

**FUNGSI KOORDINASI APARAT PEMERINTAH DALAM
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PADA
KANTOR KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO**

Oleh :

MUH NUR AMIR

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MANAN SAILAN

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk, 1. Mengetahui fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan fungsi koordinasi pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan fungsi koordinasi pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Fungsi koordinasi aparat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan telah terselenggara dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan tercapainya tujuan pembangunan dan pemerintahan yang telah ditentukan. 2. Pelaksanaan fungsi koordinasi di Kecamatan Pammana dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, Faktor pendorong yaitu, Pedoman koordinasi, Bentuk-bentuk koordinasi, Sarana koordinasi, dan hubungan kerja. Faktor penghambat yaitu kurangnya kerja sama tim atau setiap bagian lebih mementingkan tujuan bagiannya tanpa memperhatikan bidang yang lainnya. 3. Upaya yang dilakukan aparat pemerintah yaitu, mengadakan rapat untuk memberikan arahan kepada para pegawai untuk lebih menekankan pada kerjasama tim, meminta pendapat dari setiap peserta rapat dan mempertimbangkan baik buruknya kebijakan yang akan dikeluarkan, serta menekankan kepada semua aparat pemerintah Kecamatan Pammana agar saling menghormati untuk terciptanya hubungan yang baik antar aparat pemerintah sehingga fungsi koordinasi dapat diselenggarakan dengan baik.

Kata Kunci: Fungsi Koordinasi, Aparat Pemerintah

ABSTRACT: This study aims to, 1. Knowing the function of coordination of government apparatus in the implementation of government and development at the District Office Pammana Wajo Regency. 2. Knowing the factors that influence the implementation of the coordination function of government apparatus in the implementation of government and development at Pammana District Office of Wajo Regency. 3. Knowing the efforts made by the government apparatus in implementing the coordination function of government and development in Pammana District Office of Wajo Regency. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through, observation, interviews, and documentation. Data obtained from the results of research processed by using descriptive qualitative analysis to determine the function of coordination of government officials in the implementation of government and development in the District Office Pammana Wajo District, the factors that influence the implementation of the coordination function of government officials in the implementation of government and development at the District Office Pammana District Wajo, an effort made by the government apparatus in carrying out the coordination function of government and development at Pammana District Office of Wajo Regency. The results showed that: 1. The coordination function of the apparatus in the field of governance and development has been well implemented, this can be seen with the achievement of development goals and government that have been determined. 2. Implementation of coordination function in Pammana sub-district is influenced by two factors, namely, the driving factors that is, Coordination Guidance, Coordination Form, Coordination Facility, and working relationship. The inhibiting factor is the lack of teamwork or any part is more concerned with the purpose of the part without regard to other areas. 3. The efforts of the government apparatus are to hold meetings to give direction to the employees to put more emphasis on teamwork, to get opinions from every meeting participant and to consider the bad policies that will be issued, and to emphasize to all Pammana District government officials to respect each other to create a good relationship between government officials so that the coordination function can be well organized.

Keywords: Coordination Function, Government Apparatus

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga pemerintahan yang berada di wilayah Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintahan Kabupaten, membawa Visi Misi pembangunan yang diemban dalam kurun waktu tertentu sebagai upaya pencapaian arah dan tujuan pembangunan di segala bidang sebagaimana tertuang pada Rencana Strategi tahunan. Karena, semua stakeholder dituntut proaktif dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan UUD NRI 1945 dalam upaya mensejahterakan rakyat, aparat sebagai pelayan masyarakat saat ini dituntut adanya kerjasama antar semua pihak yang terkait guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di Kecamatan Pammana.

Dalam kaitannya dengan bidang pemerintahan, usaha penyempurnaan administrasi pemerintahan pada semua Desa dan Kelurahan yang secara yuridis formal merupakan pemerintahan di bawah wilayah Kecamatan, yang merupakan tumpuan segenap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu pemerintah wilayah harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan dan juga harus berinisiatif, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan serta mampu dalam pelaksanaan pembangunan.

Olehnya itu, untuk mencapai tujuan pembangunan di semua sektor diperlukan koordinasi dan kesungguhan dari aparat dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk turut serta berperan di dalamnya. Pengarahan dana dan daya tenaga secara efisien perlu dilakukan untuk menumbuhkan swadaya

masyarakat karena hal itu ikut menentukan keberhasilan pembangunan sehingga dengan demikian pembangunan dengan sumber daya manusia perlu ditingkatkan secara maksimal.

Untuk meningkatkan keterpaduan dalam pemerintahan dan proses pembangunan melalui pola koordinasi di Kecamatan Pammana sepenuhnya belum dapat berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor misalnya, adanya kecenderungan aparat dalam bekerja sering muncul perbedaan dan penafsiran dalam melihat suatu kebijakan, kurangnya komunikasi antar aparat pemerintah Kecamatan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga terkesan bekerja secara sendiri-sendiri, dan kurangnya pengetahuan aparat pemerintah mengenai fungsi koordinasi dan kesadaran aparat dalam mengaplikasikan fungsi koordinasi dengan baik. Akibatnya pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Pammana belum berjalan dengan baik, terarah dan efektif.

Berangkat dari pernyataan di atas, dibutuhkan kesiapan pemerintrah Kecamatan Pammana dalam menjalankan berbagai aktivitas pemerintahan dan pembangunan, yang harus dipahami bahwa aparat Kecamatan dalam menjalankan fungsinya dituntut mampu mengkoordinasikan perencanaan pembangunan agar kiranya dapat seiring dengan pelaksanaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, juga diperlukan koordinasi yang baik antar aparat pemerintah di Kecamatan Pammana.

Atas dasar itulah sehingga Penulis mencoba menelusuri permasalahan Penerapan fungsi Koordinasi aparat pemerintah Kecamatan, sehingga diangkat suatu penelitian sederhana dengan judul ”

Fungsi Koordinasi Aparat Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Penerapan

Penerapan adalah hal, cara atau hasil dan mempraktekkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah di rumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- Adanya program yang dilaksanakan
- Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab, 1990:45).

b. Pengertian Koordinasi.

Koordinasi adalah sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Terkait dengan hal-hal tersebut sebagai upaya untuk menyerasikan tugas bersama, tugas bagian-bagian, guna mewujudkan tujuan keseluruhan. Dari pengertian tersebut dapat diperinci unsur-unsur koordinasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Koordinasi mengandung arti sebagai suatu proses atau

kegiatan secara terus-menerus tidak pernah berhenti.

- 2) Mengandung upaya atau kegiatan untuk menyerahkan, menyelaraskan atau mensinkronisaikan unit-unit atau bagian atau tindakan di dalam suatu organisasi.
- 3) Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan melalui upaya menghilangkan kekacauan serta tumpang tindih.

c. Unsur koordinasi

Dalam peroses koordinasi, ada beberapa unsur yang terlibat, yaitu:

- a. Koordinasi, adalah seseorang yang memiliki ide, pendapat, gagasan yang ingin di sampaikan kepada orang lain. Pemimpin dalam sebuah organisasi harus menjadi seorang koordinasi yang handal untuk menyampaikan semua pemikiran-pemikiran yang dimilikinya guna mendukung terlaksananya semua kegiatan dan terwujudnya tujuan/sasaran yang diinginkan.
- b. Koordinasi, adalah seorang yang menerima pesan dari pemberi pesan (koordinasi). Koordinasi harus bisa memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh koordinasi, sehingga pesan tersebut dapat diterjemahkan dan ditindaklanjuti dalam bentuk tindakan.
- c. Tujuan, adalah sesuatu hal yang diinginkan, dicapai,

atau dibutuhkan dan proses berkoordinasi. Misalnya, tujuan seseorang pemimpin menyampaikan informasi kepada para bawahannya tentang kebijakan organisasi adalah agar semua bawahannya memahami dan menindaklanjuti informasi yang disampaikan pemimpinnya dalam bentuktindakan yang sesuai dengan kebijakan organisasi tersebut.

- d. Ide atau gagasan, adalah sesuatu alat pendukung untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain, sehingga oranglain dapat memahami dan menindak lanjutinya dalam bentuk tindakan. Setiap ide atau pemikiran-pemikiran yang baru dari pemimpin, harus dikoordinasikan kepada para bawahan (pengikutnya), sehingga semua orang yang ada dalam organisasi mengetahui dan memahami tujuan dari ide tersebut.
- e. Media, adalah saluran koordinasi yang digunakan untuk menghubungkan seseorang koordinasi dalam menyampaikan koordinasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, koordinasi antara komunikator dengan koordinasi banyak menggunakan media elektronik, seperti melalui internet, media sosial, e-mail, telepon, dan sebagainya.

- f. Umpan balik, adalah hasil yang telah dicapai dari proses koordinasi. Atau dengan kata lain, adanya pemahaman dan respon dari koordinasi atas pesan/informasi yang telah disampaikan.
- g. Gangguan atau hambatan, adalah situasi atau perilaku tertentu yang menyebabkan terganggunya atau engacaukan proses koordinasi, sehingga pesan/informasi yang disampaikan oleh komunikator, tidak diterima dengan baik atau sulit diterima oleh koordinasi. Pada pembahasan berikutnya dalam bab ini, penulis telah menguraikan hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi dalam proses koordinasi.

d. Arah koordinasi

Dalam organisasi, arah komunikasi dibagi atas tiga, yaitu :

- a. Koordinasi ke bawah, artinya koordinasi yang berlangsung dari tingkat tertentu dalam suatu kelompok atau organisasi ke tingkatan yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah. Atau dengan kata lain, pesan yang disampaikan dari tingkatan yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah. Fungsi arah koordinasi jenis ini dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah menyampaikan informasi dari pimpinan atau pihak manajemen kepada para bawahan.
- b. Koordinasi ke atas, artinya koordinasi yang mengalir

ketingkatan yang lebih tinggi dalam suatu kelompok atau organisasi. Atau dengan kata lain, pesan yang di sampaikan dari tingkatan yang lebih rendah ke tingkatan yang lebih tinggi. Fungsi arah koordinasi jenis ini dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah menyampaikan informasi dari para bawahan kepada pimpinan atau pihak manajemen tentang : tugas yang sudah diselesaikan; permasalahan pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh bawahan; keluhan-keluhan dari bawahan atas dirinya maupun tugas yang diembang; serta langkah perbaikan atas suatu personal dari bawahan.

- c. Koordinasi lateral (Horizontal), artinya koordinasi yang berlangsung di antara anggota dari kelompok kerja yang sama, antara anggota kelompok kerja pada tingkat yang sama, atau sama staf yang sederajat. Fungsi arah koordinasi jenis ini dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah menyampaikan informasi antara karyawan atau kelompok kerja yang setara tentang: penyelesaian konflik; penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan bersama; koordinasi tugas dan kerjasama kelompok; menjalin hubungan yang baik di tingkatan yang sama.
- d. Koordinasi vertikal, artinya koordinasi yang mengalir dari tingkatan paling atas (pimpinan atau pihak manajemen) ke tingkatan paling bawah (karyawan), dan sebaliknya dari tingkatan paling bawah ke tingkatan paling atas. Fungsi arah

koordinasi jenis ini dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah saling memberi dukungan dari menciptakan hubungan yang baik pada setiap tingkatan/hierarki, sehingga tercipta kerja sama setra koordinasi yang baik pada masing-masing tingkatan.

e. Hambatan Koordinasi

Davis dan Newstrom (1991), menjelaskan ada beberapa hambatan dalam koordinasi, yaitu :

- a. Hambatan Probadi, adalah gangguan koordinasi yang timbul dari emosi, nilai, dan kebiasaan menyimak yang tidak baik. Hambatan ini sering terjadi dalam situasi kerja;
- b. Hambatan Fisik, adalah gangguan koordinasi yang terjadi dalam lingkungan tempat berlangsungnya koordinasi. Misalkan suara keributan, jarak di antara orang-orang, dinding yang membatasi, gangguan melalui udara, sehingga itu semua dapat menghilangkan atau mengganggu penyampaian secara lisan;
- c. Hambatan Semantik, adalah hambatan yang timbul dari batasan dalam simbol yang dikoordinasikan. Simbol tersebut memiliki beragam arti dan kita harus memilih satu dari banyak itu. Namun, adakalanya kita memilih arti yang salah sehingga timbul kesalahpahaman.

f. Fungsi Koordinasi

Roobbins (1966) menyebutkan bahwa koordinasi menjalankan 4 fungsi di dalam organisasi yaitu :

- 1) Kendali (kontrol, pengawasan), artinya koordinasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara.
- 2) Motivasi, artinya koordinasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada anggota organisasi apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja dengan baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika di bawah standar.
- 3) Pengungkapan emosional, artinya koordinasi menyalurkan ungkapan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial.
- 4) Informasi, artinya koordinasi berhubungan dengan perannya dalam mempermudah pengambilan keputusan.

g. Tinjauan Umum Tentang Aparat Pemerintah Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 1995: 4). Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina Desa/Kelurahan. Kecamatan

merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini menekankan pada deskripsi atas fenomena yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan obyek penelitian mencakup “fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”. Dengan mengumpulkan informasi detail melalui prosedur pengumpulan data.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yakni pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo karena fungsi koordinasi di Kecamatan Pammana masih perlu ditingkatkan.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah :

- Fungsi koordinasi yaitu tindakan yang dilakukan antar aparat pemerintahan Kecamatan Pammana untuk mengkomunikasikan berbagai aktifitas atau pekerjaan dalam hal menjalankan pemerintahan dan pembangunan.
- Aparat pemerintah yang dimaksud yaitu Camat, Sekertaris Camat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial.

Ada 3 tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian.

1. Tahap Perencanaan

2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Terdapat 2 (dua) sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

- Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang telah dipilih, yaitu aparat pemerintah dan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Pammana yang jumlahnya 6 orang yakni : Camat 1 Orang, Sekcam 1 Orang, Kasi pemerintahan 1 Orang, Kasi perekonomian & pembangunan 1 Orang, anggota kasi pemerintahan 1 orang, anggota kasi perekonomian & pembangunan 1 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor Kecamatan Pammana mengenai pelaksanaan fungsi koordinasi pada kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan fungsi koordinasi aparat pemerintahan.

Instrument penelitian yang digunakan peneliti adalah lembar pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan selama proses wawancara berupa garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, yang bertujuan menggali informasi sebanyak banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan.

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Pengamatan yang dilakukan dengan memperhatikan objek yang diteliti yakni fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.

2. Wawancara

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini yaitu kegiatan tanya jawab dengan responden yang telah dipilih untuk memperoleh informasi secara langsung berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen mengenai fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.

Teknik analisis data adalah teknik pengelolaan data sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN

1. Fungsi Koordinasi Aparat Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Dan Pembangunan

Pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo

Pola koordinasi yang dijalankan oleh aparat pemerintah Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan adalah pola koordinasi vertikal dan horisontal. Pola koordinasi vertikal merupakan pola koordinasi yang dilakukan oleh atasan dengan bawahannya di kantor Kecamatan Pammana, misalnya kordinasi vertikal antara Camat dengan Kasi Pemerintahan, antara Camat dengan Kasi Perekonomian dan Pembangunan, dan Camat dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat, begitu juga sebaliknya yaitu koordinasi pegawai Kecamatan dengan camat. Sedangkan pola koordinasi horisontal adalah pola koordinasi yang dilakukan antar sesama aparat pemerintah kecamatan yang memiliki kedudukan yang sama, seperti kordinasi antara Kasi Pemerintahan dengan Kasi Perekonomian dan Pembangunan, serta Kordinasi antara Kasi Pemerintahan dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Pola koordinasi yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Pammana. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan efektif, terarah dan tujuan yang ditargetkan dapat tercapai dengan maksimal bahkan melebihi target. Untuk mencapai target pemerintahan dan pembangunan, maka semua aparat pemerintah Kecamatan Pammana diwajibkan menjalankan fungsi koordinasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya koordinasi yang dilakukan kepada seluruh aparat pemerintah Kecamatan terhadap setiap perencanaan pembangunan dan pemerintahan.

Fungsi koordinasi dalam pemerintahan di Kecamatan Pammana

telah berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dengan seksama pada penguasaan TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) masing-masing setiap aparat pemerintahan. Dan pemberian pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, hal ini dapatdiihat dari peran koordinasi yang telah dijalankan dengan baik, dan dikoordinasikan dengan berbagai unsure stakeholders dalam wilayah pemerintahan Kecamatan, keluran dan Desa serta lembaga kemasyarakatan yang ada.

Mekanisme koordinasi yang dilakukan di Kantor Kecamatan Pammana yaitu mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mengkoordinasi jika muncul suatu masalah, melakukan seminar-seminar pelatihan untuk menunjang pemahaman yang dapat menambah suatu wawasan pada setiap anggota organisasi, transfer staf antar bagian, artinya saling menukar pikiran dalam mengerjakan suatu masalah, membentuk satuan-satuan tugas yaitu koordinasi sementara antara bagian-bagian dalam suatu organisasi, membentuk keanggotaan dalam tim atau panitia, hal inbertujuan untuk menjamin adanya pengetahuan tentang bagian-bagian serta kegiatan-kegiatan lain, ikut serta dalam suatu pelatihan untuk mencapai tujuan organisasi, membentuk posisi-posisi penghubung , mengadakan perjanjian atau persetujuan kerja secara tertulis, artinya setiap masing-masing bagian membuat kesepakatan kerja, keanggotaan fulltime dalam suatu panitia, artinya setiap anggota bekerja secara optimal.

2. Faktor dominan dalam pelaksanaan fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada

Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu, faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong yang di maksud adalah sarana koordinasi dan hubungan kerja.

a. Sarana koordinasi dan hubungan kerja

Faktor sarana koordinasi terdiri dari Kebijakan yang merupakan keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan yang di peroleh melalui rapat atau musyawarah dengan pegawai pemerintahan, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Perencanaan yang merupakan kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada masa tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang di tetapkan. Tata kerja merupakan langkah yang ditempuh untuk mengatur sebuah pekerjaan agar terlaksana dengan baik dan efisien. Sedangkan prosedur merupakan tahapan dalam tata kerja tentang bagaimana mengelola sebuah pekerjaan.

Rapat merupakan pertemuan antar anggota dilingkungan kantor sendiri untuk membahas masalah yang menyangkut kepentingan bersama yang hasilnya berupa sebuah kebijakan maupun keputusan untuk peningkatan kinerja aparat pemerintahan kedepannya, sedangkan berifing adalah pengarahan yang diberikan setiap saat kepada para pegawai untuk mensosialisasikan aturan-aturan atau kebijakan kebijakan yang telah dibuat. Surat keputusan bersama atau surat edaran bersama bertujuan

untuk mensosialisasikan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat.

b. Bentuk-bentuk koordinasi dan hubungan kerja

Bentuk-bentuk hubungan kerja dapat dipilah menjadi forum yang merupakan suatu sarana yang disediakan untuk berinteraksi dan berdiskusi bagi para pegawai. Tim, panitia, kelompok kerja, merupakan keanggotaan yang dibentuk agar para anggotanya saling berbagi informasi untuk membuat keputusan di wilayah kewenangannya masing-masing.

Dewan atau badan yang terdiri atas beberapa anggota yang pekerjaannya memberi nasihat dan sebagainya dengan jalan berunding. Dan sistem satu atap (one roof system) atau sistem satu pintu (one door system).

c. Pedoman koordinasi

Pedoman koordinasi terdiri dari Kebijakan Perlu di tentukan secara jelas siapa atau satuan kerja mana yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab atas sesuatu masalah. Pejabat atau instansi yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab mengenai suatu masalah, berkewajiban memprakarsai dan mengkoordinasikan dan melakukan hubungan kerja.

Perlu dirumuskan secara jelas wewenang, tanggung jawab dan tugas-tugas satuan-satuan kerja. Perlu dirumuskan program kerja organisasi secara jelas yang memperlihatkan keserasian kegiatan di antara satuan-satuan kerja. Perlu dikembangkan komunikasi timbal balik untuk menciptakan kesatuan bahasa dan kerjasama. Koordinasi dan hubungan kerja akan lebih efektif dan apabila yang berkewajiban mengkoordinasikan dan melakukan hubungan kerja mempunyai jiwa kepemimpinan dan kredibilitas yang

tinggi. Dalam pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja perlu dipilih sarana koordinasi dan hubungan kerja yang paling tepat.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan koordinasi aparat pemerintahan yang ditemukan dalam penelitian yaitu Setiap bagian/golongan mementingkan bagiannya masing-masing, sehingga dapat menghambat suatu kinerja dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Setiap kepala bagian atau unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dalam unitnya sendiri. Adanya vested interested dalam unit-unit atau bagian-bagian, sehingga mereka cenderung untuk memusatkan perhatian pada tujuan bagiannya sendiri.

Ketiga hal tersebut dikatakan sebagai penghambat dalam suatu koordinasi karena setiap masing-masing bagian mementingkan bagiannya sendiri-sendiri tanpa adanya kerjasama dalam koordinasi tersebut. Selain itu salah satu faktor penghambat yang ada adalah tingkat pemahaman dan pengetahuan aparat dalam menjalankan fungsi koordinasi terkait dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang kurang, dimana pelayanan memerlukan suatu pengetahuan dan keterampilan.

3. Upaya yang dilakukan oleh para aparat dalam melaksanakan fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini mengeni upaya yang dilakukan oleh aparat dalam melaksanakan fungsi koordinasi pemerintah telah sesuai karena dilakukan berdasarkan faktor penghambat yang ditemui dilapangan seperti :

1. Setiap bagian/golongan mementingkan bagiannya masing-masing, sehingga dapat menghambat suatu kinerja dalam mengerjakan tugasnya masing-masing.
2. Setiap kepala bagian atau unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dalam unitnya sendiri
3. Adanya vested interested dalam unit-unit atau bagian-bagian, sehingga mereka cenderung untuk memusatkan perhatian pada tujuan bagiannya sendiri.

Dari faktor penghambat diatas maka pemerintah Kecamatan Pammana selalu meminta pendapat dan saran dari setiap peserta rapat dan mempertimbangkan baik buruknya kebijakan yang akan dikeluarkan tersebut untuk kinerja para pegawai kedepannya dan pemerintahan, sehingga pegawai bisa senang bekerja dan kinerjanya meningkat. Memberikan nasihat kepada para pegawai agar tetap mengupayakan pelaksanaan program kerja bidangnya masing-masing dan memperhatikan program kerja bidang lain.

Mengadakan rapat maupun membuka forum untuk memberikan sugesti dan arahan kepada para pegawai untuk lebih menekankan pada kerjasama tim. Jadi para pegawai tidak hanya terfokus pada bidangnya masing-masing saja tapi lebih memperhatikan bidang yang lain karena kita semua satu kesatuan.

Dalam menjalankan fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada kantor Kecamatan Pammana yang efektif maka perlu pula ada upaya pencegahan perbedaan persepsi sehingga tercipta kesatuan

tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.

Jadi, upaya yang harus dilakukan tidak hanya harus berdasarkan faktor penghambat sehingga tapi harus pula dilakukan upaya pencegahan sebelum adanya faktor penghambat yang ditemui.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai judul pada Bab IV, maka disimpulkan :

1. Fungsi koordinasi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan tercapainya tujuan pembangunan dan pemerintahan yang telah ditentukan. Setiap kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di koordinasikan dengan seluruh aparat pemerintah Kecamatan Pammana sehingga tercipta kesatuan tindakan dari aparat pemerintah.
2. Pelaksanaan fungsi koordinasi di Kecamatan Pammana dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong yaitu, Pedoman koordinasi, Bentuk-bentuk koordinasi, Sarana koordinasi dan hubungan kerja. Faktor penghambat yaitu kurangnya kerja sama tim atau setiap bagian lebih mementingkan tujuan bagiannya tanpa memperhatikan bidang yang lainnya.
3. Apabila muncul kendala maka segera diatasi dengan melakukan upaya-upaya berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut yaitu, mengadakan rapat maupun membuka forum untuk memberikan sugesti dan arahan

kepada para pegawai untuk lebih menekankan pada kerjasama tim, dalam rapat kita selalu meminta pendapat dari setiap peserta rapat dan mempertimbangkan baik buruknya kebijakan yang akan dikeluarkan, serta menekankan kepada semua aparat pemerintah Kecamatan Pammana agar saling menghormati agar tercipta hubungan yang baik antar aparat pemerintah sehingga fungsi koordinasi dapat dijalankan dengan baik.

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu

1. Koordinasi yang dilakukan di kantor Kecamatan Pammana hendaknya dikembangkan, dimana koordinasi yang baik bukan hanya dilakukan di dalam kantor saja antar aparat pemerintah, namun juga harus dilakukan dengan Lurah/Kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Pammana serta masyarakat dalam meningkatkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan..
2. Camat Pammana selaku pemimpin Kecamatan Pammana seharusnya lebih memperhatikan factor penghambat pelaksanaan fungsi koordinasi di kantor Kecamatan dan melakukan tindakan berdasarkan factor penghambat tersebut seperti menekankan kepada anggotanya untuk mengedepankan kerjasama antar aparat pemerintah dan tidak hanya mementingkan bidangnya saja.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan harusnya lebih ditingkatkan, bukan hanya camat sebagai pemimpin yang bertanggung jawab namun semua

aparatur pemerintah kecamatan
pammana harus melakukan upaya
dalam mengatasi hambatan
pelaksanaan fungsi koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, Prajudi, 1979, *Administrasi dan Manajemen Umum*, PT Gahlia Indonesia, Jakarta
- A.W.Widjaja, 1985, "Peranan Motivasi dalam kepemimpinan", Akademika presiden. Jakarta
- A.M.mangunhardjana, SJ, 1976 "Kepemimpinan" Yayasan Kanasius. Yogyakarta
- Alfred R.Latiener, 1985. "Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja". Aksara Baru. Jakarta
- Efendi Taufik, 1995, *Dasar-Dasar keterampilan Abdi Negara Melayani Masyarakat*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Farid Ali, 2001 *Teori dan konsep Administrasi, dari pemikiran paradigmatis menuju redefensi*, Raja grafindo Persada Jakarta
- Gaspersz Vincent (Eds.), Indonesia "Manajemen Kualitas; Penerapan Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total", Gramedia Indonesia
- G.R.Terry dan Rule, L.W. 2003 "Dasar-dasar manajemen" Terjemahan Ticoula G.A. Bumi Aksara. Jakarta
- Ibrahim, Soewarno, 1997, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, PT Gunung Agung, Jakarta
- J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Rineka
- J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Rineka
- Kotler, 1995, *How To Improve Your Customer Service* (Eds.,) Indonesia 1997 "Kiat Meningkatkan Pelayanan Bagi Pelanggan" Gramedia Indonesia
- Lailil Kadar, 1994, *Organisasi dan Manajemen*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta
- Masjihanto, 1999, *Organisasi dan Motivasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Soewarno Handyaningrat, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta : PT Gunung Agung, 2002), hlm. 117
- Sondang P.siaagian, 1983. "Organisasi, kepemimpinan dan Perilaku administrasi". PT.Gunung Agung. Jakarta
- The Liang Gie. 1992 "Administrasi perkantoran Modern" Yogyakarta, Libreti
- Thoha, Mifta. 2003a. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. (cetakan kedelapan). Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Tjokroamidjojo, Bintor Prof, MA "Perencanaan

- Pembangunan*” PT.
Gunung Agung, Jakarta
- Sugiyono, 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung :
Alfa Beta
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R & D*.
Bandung Alfa Beta
- Sujatmiko,Ir.1987, “*Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*” Sinar
Grafika, Jakarta.
- 2001, Kewenangan pemerintah Desa,
Departemen Dalam Negeri Jakarta.
- 2002, Orentasi penguatan otonomi Desa,
Pemprov Sul-Sel
- 2002 “ Himpunan peraturan pelaksanaan
undang-undang otonomi daerah, Sinar
Grafika, Jakarta.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004,
“tentang Pemerintahan
Daerah”, citra
umbara,bandung